

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat dihindarkan dan sangat erat kaitannya dengan suatu kejahatan dan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang hanya di rumuskan dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai suatu kejahatan maupun tindak pidana.

Suatu tindak pidana tersebut dapat di cegah atau di antisipasi melalui masyarakat agar tidak terjadi dan tidak terus berkembang seiring berkembangnya teknologi, dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana tersebut. Karena sesuatu yang tidak di dasari dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana dan semakin modern-nya jaman, maka akan mengakibatkan terus berkembang dan meningkatnya suatu tindak pidana.

Tak jarang yang menjadi korban kejahatan atau tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Anak dapat dikatakan yaitu seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa, jika banyak orang yang melakukan tindak pidana terhadap anak, maka secara tidak langsung mereka merusak generasi-generasi penerus bangsa. Dengan semakin banyaknya

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, BAB I.

tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korbannya beberapa tahun belakangan, ini membalikkan pernyataan bahwa anak dilindungi.

Payung hukum untuk melindungi anak di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai. Kita juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tahun 2006 juga telah diintrodusir beberapa UU, PP, Keppres hingga Peraturan Menteri yang memberikan perhatian atas perlindungan anak.²

Di Indonesia, anak harus mendapatkan pendidikan, perlindungan dan pendampingan dari orang tua maupun dari orang-orang disekitar lingkungan ia hidup, justru mendapatkan perlakuan sebaliknya yang tidak seharusnya dilakukan kepada seorang anak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah di jelaskan mengenai perlindungan-perlindungan yang seharusnya di berikan kepada anak, namun dengan adanya undang-undang tersebut tidak menjamin bahwa seorang anak tersebut mendapatkan perlindungan selayaknya.

² Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta: CV.Graha Putra, 2010), hlm.7.

Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai hukuman serta denda untuk seseorang yang melanggar aturan dalam Pasal 76D

Namun demikian, tindak pidana yang cukup sering terjadi terhadap anak adalah tindak kekerasan. Kekerasan tersebut didapat dari keluarga atau orang tua bahkan tidak jarang juga di dapat dari guru yang mengajarnya di sekolah. Kekerasan yang diterimanya baik kekerasan fisik maupun kekerasan mental.

Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merasa bahwa kekerasan terhadap anak sangat tinggi, sehingga membuat KPAI mendesak Kemendikbud untuk membuat sistem yang tepat supaya tercipta rasa aman dan nyaman untuk anak.³

Di Kota Malang sendiri untuk kasus kekerasan terhadap anak, data yang diperoleh penulis pada tahun 2015 ada 28 (dua puluh delapan) kasus kekerasan, 10 (sepuluh) laporan persetubuhan, dan 7 (tujuh) laporan kasus pencabulan. Tahun 2016 ada 30 (tiga puluh) laporan kekerasan, 10 (Sepuluh) laporan persetubuhan, dan 6 (enam) laporan pencabulan. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai awal April, Polres Malang Kota mendapat 8 (delapan) kasus kekerasan terhadap anak.⁴

³ Davit Setyawan, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi KPAI Desak Kemendikbud Ciptakan Sistem yang Tepat*, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-kpai-desak-kemendikbud-ciptakan-sistem-yang-tepat/>, access 13 Maret 2018.

⁴ Sri Wahyunik, *Terkait Kasus Kekerasan, Kapolres Malang Kota: Anak Bisa Jadi Pelaku atau Korban*, dalam <https://suryamalang.tribunnews.com>, access 13 Maret 2018.

Berdasarkan penjelasan dari Kanit Perlindungan Perempuan Anak di Polres Malang Kota, IPTU Tri Nawang Sari, S.H, angka kekerasan terhadap anak sejak tahun 2017 sampai 2018 terus meningkat. seperti uraian data sebagai berikut:

	Tahun	Jumlah	Rentang usia
Kekerasan Terhadap Anak	2017	37 kasus	< 18 tahun
	2018	42 kasus	< 18 tahun

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang menyebutkan, selama tahun 2016 dinas itu menerima dan menangani 32 (tiga puluh dua) kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.⁵

Pada dasarnya tindak pidana kekerasan maupun pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Korban adalah mereka yang menderita jasmanian dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.⁶ Kekerasan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademi Prassindo, 1993), hlm. 63.

⁷ Tim Penyusun Pusat Kamus, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke 3 Cet ke 4, Jakarta : Balai Pustaka.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual semakin berkembang seiring berkembangnya jaman dan teknologi. Seperti halnya, orang-orang yang berkomentar di media sosial dengan bahasa yang berkonotasi seks, gambar-gambar yang di edit yang mengandung unsur porno kemudian di bagikan di media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat jika angka kekerasan terhadap anak di Kota Malang terus bertambah, maka secara akademik perlu dilakukan penelitian guna mengetahui apa yang menjadi penyebab utama dan penyebab terbesar dari terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pentingnya bahasan ini untuk dibahas yaitu agar kita dapat menemukan jalan keluar untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Malang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Malang Kota terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana yang ada di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak ini terus terjadi dimasyarakat Kota Malang.
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wacana bagi masyarakat umum mengenai upaya perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, dan faktor-faktor yang menjadikan tindak pidana kekerasan tersebut terjadi.
 - b. Dapat dijadikan sebagai sebuah karya tulis hukum dan dapat dipelajari oleh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga oleh masyarakat luas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi penulis

Sebagai bahan pembelajaran tambahan bagi penulis mengenai faktor dan upaya yang dilakukan kepada kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak.

b. Manfaat bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini, masyarakat dapat menambah wawasan ilmu hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga para orang tua dapat menjaga anaknya dengan lebih baik lagi, dan para orang tua tidak sampai melakukan kekerasan kepada anaknya.

c. Manfaat bagi pihak berwenang

Sebagai sumber pembelajaran dan pengetahuan bagi para pihak berwenang agar lebih banyak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi angka tindak pidana kekerasan terhadap anak.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulis melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan.
- b. Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang perlindungan hukum yang sebenarnya.
- c. Dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan referensi mengenai perlindungan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak.

F. Metode Penelitian

Pada proses penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan di Polres Malang Kota ini saya menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah ada di lingkungan masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

1. Lokasi Penelitian

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis memilih lokasi penelitian di Polres Malang Kota, karena di Polres Malang Kota menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang dituju penulis di Polres Malang Kota yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dari artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam menyelesaikan dan menyempurnakan tugas akhir ini, penulis melakukan observasi yaitu di Polres Malang Kota.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada di Polres Malang Kota, utamanya data yang terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi maupun data dari seorang narasumber yang bersangkutan dengan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, penulis lakukan dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Penyidik di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.

4. Analisa Data

Dalam proses menganalisis data yang telah penulis dapatkan pada proses wawancara dan observasi guna untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif yaitu dimana data yang akan digambarkan dalam pembahasan nanti sesuai dengan fakta yang telah didapat dan akan dianalisa dengan memberi kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang diantaranya terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku panduan skripsi yang terdiri dari:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan hukum ini, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, kegunaan dari penelitian, metode dan sistematika penulisannya seperti apa.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi tinjauan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukumnya. Bab ini membahas tentang perlindungan hukum, anak dibawah umur, dan korban tindak pidana kekerasan.

3. BAB III Pembahasan

Pada bab ini yang dibahas oleh penulis adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Polres Malang Kota yaitu diantaranya mengenai data-data tindak pidana kekerasan yang terjadi di Kota Malang, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Polres Malang Kota terhadap anak yang menjadi korban.

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini yang dibahas ada dua yaitu kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan sebelumnya dan saran berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis.

